

SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Neco Fransiska¹, Aris Eddy Sarwono², Dewi Saptantinah Puji Astuti³

¹Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
email: necoprancisca@yahoo.co.id

²Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
email: aris_sarnur@yahoo.co.id

³Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
email: dewi.astutie@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the weakness of the internal control system on the quality of financial statements of local government in Indonesia. The results this study indicate that the weakness of the control system of accounting and reporting and weaknesses of the internal control structure a negative effect, which means that the level of susceptibility decreases the quality of the financial reports of local governments will be better and reliable. In contrast to the weakness of the control system implementation of the budget revenues and expenditures that affect positively on the quality of financial statements. Which means that the higher the weakness of the system is the better quality local government financial reports. For the overall results prove that any weaknesses in the internal control system simultaneously has influence on the quality of financial reports of local governments in Indonesia. So the results of this study prove that the weakness of internal control system is important to note that more and produce financial statements qualified local government.

Keywords: *Control system, accounting and reporting, Income and Expenditure Budget, Quality of financial reports.*

1. PENDAHULUAN

Dasar pengelolaan laporan keuangan yang baik merupakan prinsip tata kelola yang harus diberlakukan disemua negara di dunia termasuk di Indonesia. Pengelolaan yang baik ini perlu adanya sistem dan prosedur kelembagaan yang mendukung terciptanya kualitas dari laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya. Laporan keuangan yang berkualitas menurut Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan dapat dilihat dari ciri khas karakteristik laporan keuangan yaitu mudah dipahami, keandalan, relevan, bersifat jujur, bisa dibandingkan dan memiliki kelengkapan informasi mengenai laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan (LK) pemerintah (Purwanugraha dkk, 2011:91). Pemerintah mengalami pebaharuan yang baik dalam hal pencatatan dan pengelolaan keuangan setelah menerapkan SAP dalam pemerintahan (Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh, 2008). Meskipun keterbatasan dalam hal penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) masih banyak kendala-kendala yang harus dihadapi pemerintah antara lain yaitu menyangkut sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, seperti penyiapan peraturan, sistem, dan infrastruktur yang belum sempurna, kurangnya komitmen pimpinan K/L, banyaknya jumlah satuan kerja yang masih belum memiliki kompetensi akuntansi pemerintahan, serta belum tersedianya SDM dengan kualitas memadai di bidang keuangan dan akuntansi. Untuk itu menerapkan SAP yang lebih konsisten dengan standar yang diharapkan, serta diperlukan perubahan pola pikir (*mindset*), kompetensi, dan integritas dari seluruh pihak yang terlibat untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan SAP (Accounting Media).

Hasil penelitian Setiawan (2012) tentang Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia mengatakan kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia, yang berarti laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki unsur transparansi dan akuntabilitas. Perkembangan dan kemajuan negara Indonesia saat ini cukup pesat di sektor pemerintahan, terbukti dengan adanya desentralisasi di dalam keuangan di Pemerintah Daerah. Otonomi daerah di Indonesia sudah dilaksanakan

sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang. Namun pelaksanaannya mempunyai kadar yang berbeda-beda seperti di zaman orde baru yang sentralistik di mana kekuasaan pusat sangat besar. Berbeda dengan era reformasi di mana daerah diberi otonomi seluas-luasnya (Wahyu, 2014).

Masalah pertanggungjawaban atas APBD dalam satu periode di suatu daerah diperlukan laporan keuangan yang mengandung unsur kualitas laporan keuangan. Peraturan yang terkait dengan laporan keuangan dapat dilihat pada Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 31. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari pemerintah daerah kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Junaedi Yusup, 2014). Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya (Undang-Undang No 17 th 2003 pasal 31 ayat 1).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar ini dijadikan pedoman oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan seperti Herawati (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dimana didapatkan pengaruh sistem pengendalian intern (lingkungan pengendalian, resiko aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan) terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Susilawati dan Riana (2014) menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Upabayu dan Putra (2014) menunjukkan adanya pengaruh positif dari sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Oleh karena itu isu penelitian tentang sistem pengendalian intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia masih menarik untuk dilakukan penelitian.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Pensinyalan

Menurut Jama'an (2008) Teori Pensinyalan (*Signaling Theory*) mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa pemerintah lebih baik dan mengalami kemajuan dari pada waktu sebelumnya. Menurut Immaculatta (2006) kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan (pemerintah) dalam laporan keuangan. Kualitas informasi tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek pemerintah dimasa mendatang dibanding pihak eksternal pemerintah. Informasi tentang perkembangan dan kemajuan pemerintah yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan pemerintah tersebut dan menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan resiko yang dimiliki. Menurut Scott dan Brigham (2008) sinyal adalah sebuah tindakan yang diambil oleh manajemen pemerintah yang memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana manajemen memandang prospek pemerintahan.

2.2. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2010) yaitu: "Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia". Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan (Susilawati dan Riana, 2014). Dalam PP No 71 tahun 2010 menyatakan bahwa : "Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan." Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010, yaitu: Basis Akuntansi; Nilai Historis (*Historical Cost*); Realisasi (*Realization*); Substansi Mengungguli Bentuk Formal

(*Substance Over Form*); Periodisitas (*Periodicity*); Konsistensi (*Consistency*); Penyajian Wajar (*Fair Presentation*).

2.3. Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah pemerintahan yang mengurus rumah tangga daerah dengan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Sejarah mengenai pemerintah daerah dari tahun 1945 sampai 2014 merupakan perjalanan yang cukup panjang untuk sebuah daerah dapat mencapai posisi yang lebih baik dan layak. Selain Undang-Undang mengenai pemerintah daerah, pemerintah pusat juga membuat Undang-Undang yang mengatur tentang keuangan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan tujuan setiap pelaksanaan kegiatan daerah dapat dibuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Hilmi dan Martani (2011) mengenai Undang-Undang yang terkait dengan keuangan pemerintah daerah yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan dasar dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan di Indonesia. Reformasi pengelolaan keuangan dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dan audit.

2.4. Penilaian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. Sedangkan kualitas laporan keuangan adalah informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Semakin besar tingkat pengungkapan yang diinformasikan semakin baik juga tingkat pemahaman akan kinerja dari laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan mengandung unsur kelengkapan informasi, ketepatanwaktuan informasi, informasi yang andal atau dapat dipercaya serta dapat dibandingkan dan kelengkapan informasi pada laporan keuangan.

Menurut Agoes (2012) pemeriksaan laporan keuangan akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang menghasilkan opini dari pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi dari laporan keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan, antara lain sebagai berikut: 1). Relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki karakteristik: memberikan manfaat umpan balik (*feedback value*); memberikan manfaat prediktif (*predictive value*); disajikan tepat waktu (*timeliness*). 2). Andal (*Reliability*). Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: penyajian jujur (*faithfulness of presentation*); dapat diverifikasi (*verifiability*); netralitas. 3). Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya. 4). Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.5. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern menurut Undang-Undang No. 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI). Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi efektifitas sistem pengendalian intern. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut Agoes (2008) Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi lima unsur pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

efektifitas dan efisien pencapaian tujuan entitas. Keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang didesain untuk dapat mengenali apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Oleh BPK kelemahan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dikelompokkan menjadi tiga katagori yaitu; 1).Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; 2). Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan 3). Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada atau tidaknya struktur pengendalian intern atau entitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta melihat ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dan berperan penting untuk mencegah dan mendekteksi adanya kecurangan. Sehingga menilai kualitas laporan keuangan daerah diharuskan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan juga sumber kekayaan yang dimiliki oleh daerah. Penelitian yang dilakukan Defera (2013) membuktikan bahwa adanya beberapa kelemahan sistem pengendalian intern yang berpengaruh negatif terhadap penentuan opini LKPD di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dari iktisar hasil pemeriksaan BPK tahun 2013 dan tahun 2014. Populasi dalam penelitian ini seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia sebanyak 524. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti menggunakan *Probability Sampling* atau *Random Sampling* yaitu sesuatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi (Sugiyono, 2014). Sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Setelah sampel diketahui untuk keseluruhan LKPD di Indonesia lalu sampel akan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu sampel untuk pulau jawa dan sampel untuk luar pulau jawa. Teknik pengumpulan data melalui pengunduhan *file* dari *website* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di alamat *website* www.bpk.go.id dan meminta langsung *via email* kepada Humas BPK.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi logistik. Penggunaan analisis logistik regresi logistik adalah karena variabel dependen bersifat dikotomi (tepat dan tidak tepat). Teknik analisis dalam mengolah data ini tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2011). Adapun model regresi logistik dengan persamaan sebagai berikut:

$$KLKPD = \beta_1 KSPAP - \beta_2 KSPPAPB - \beta_3 KStPI$$

Keterangan:

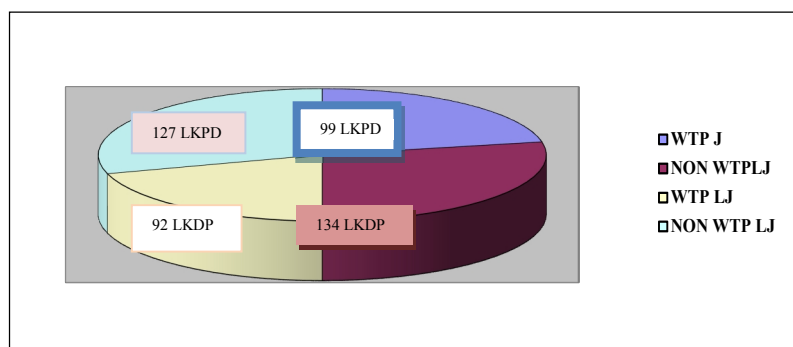
KLKPD	: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
$\beta_1 KSPAP$: Kelemahan Sistem pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
$\beta_2 KSPPAPB$: Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Belanja
$\beta_3 KStPI$: Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif

Populasi penelitian ini berjumlah 524 Pemerintah Daerah di Indonesia yang melaksanakan fungsi akuntansi atau penatausahaan keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 452 Pemerintah daerah di Indonesia. Gambaran mengenai penggolongan opini BPK disajikan dalam gambar 1.

Gambar 1
Penggolongan Data Opini Bpk
Tahun 2013-2014



Berdasarkan analisis statistik penghitungan, maka jumlah opini WTP yang terdiri dari WTP dan WTP-DPP yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebanyak 191 LKPD, sedangkan opini NON WTP yang terdiri dari WDP, TW, dan TMP sebanyak 261 LKPD. Selain itu, data yang diolah peneliti dipisahkan antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ada di pulau Jawa dengan LKPD yang berada di luar pulau Jawa, hal ini dilakukan karena dewasa ini tingkat infrastruktur yang ada di pulau Jawa lebih baik daripada yang berada di luar pulau Jawa. Diperoleh jumlah hasil dari opini BPK yakni WTP (WTP dan WTP-DPP) dan NON WTP (WDP, TW, dan TMP). Jumlah WTP di pulau Jawa sebanyak 99 LKPD, sedangkan NON WTP di pulau Jawa sebanyak 127 LKPD. Jumlah WTP di luar pulau Jawa sebanyak 92 LKPD, sedangkan NON WTP di luar pulau Jawa sebanyak 134 LKPD.

4.2. Analisis Data

Hasil analisis pengaruh antara kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern yang tercakup dalam kelemahan sistem pengendalian intern nantinya digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui adanya pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penganalisisan ini menggunakan analisis logistik di mana setiap variabel bebas (kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern) akan diuji untuk mengetahui tingkat pengaruh terhadap variabel terikat (kualitas laporan pemerintah daerah) dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu pengkatagorian jenis variabel tertentu, dalam hal ini variabel *dummy* adalah opini BPK yang tergolong menjadi dua yaitu yang pertama WTP yang terdiri dari: WTP dan WTP-DPP yang diberi skor 1 (satu), dan yang kedua NON WTP yang terdiri dari: WDP, TW, dan TMP yang diberi skor 0 (nol). Identifikasi mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Data Penelitian

Pengukuran	N	Persentase
Data terpilih	452	100,0
Data Hilang	0	0
Total	452	100,0

Sumber: data yang diolah 2016

Identifikasi data hilang, pada tabel 1 tidak terdapat data yang hilang (*Missing Cases*). Artinya bahwa data sampel sebanyak 452 LKPD tidak ada yang hilang dalam proses pengolahan data.

4.1. Peggolongan Kategori (*Dependent Variable Encoding*)

Tabel 2
Data Peggolongan Katagori

Keterangan	Nilai Peggolongan
NON WTP	0
WTP	1

Sumber: data diolah 2016

Pemberian kode oleh *program SPSS*, menurut pengkodean *SPSS* yang termasuk katagori WTP dan NON WTP adalah pemberian opini yang disampaikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

4.2. Ketepatan Data (*Classification Table*)

Tabel 3
Data Ketepatan Penelitian

No.	Penelitian	Non WTP	WTP	Presentase Ketepatan
1.	Opini Bpk Non WTP	197	64	75,5
2.	Opini BPK WTP	118	73	38,2
<i>Presentase Keseluruhan</i>				59,7

Sumber: data diolah 2016

Pada tabel 3 Ketepatan Penelitian adalah untuk *presentase* ketepatan model dalam mengklasifikasikan penelitian yaitu 59,7 persen. Artinya dari data observasi sebanyak 452 LKPD, ada 270 LKPD yang tepat pengklasifikasiannya oleh model regresi logistik.

4.3. Uji Parsial dan Pembentukan Model

Tabel 5
Analisis Regresi Logistik

Model	B	S. E	Sig.
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	-0,221	0,050	0,000
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	0,061	0,033	0,062
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	-0,165	0,058	0,004

Sumber: data diolah 2016

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa ada 2 variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena masing-masing dari nilai tersebut memiliki nilai yang lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Variabel-variabel tersebut adalah KSPAP (Sig.=0,000) dan KSPI (Sig.=0,004). Variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan yaitu KSPAP (Sig.= 0,62) yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel 5, maka model yang terbentuk dalam penelitian ini adalah:

$$KLKPD = -0,221KSPAP + 0,061 KSPAB - 0,165KSPI$$

Koefisien regresi untuk KSPAP sebesar -0,221 dengan Koefisien regresi untuk KSPI sebesar -0,165 berpengaruh negative terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berarti disaat kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta kelemahan stuktur pengendalian intern dalam temuan kasus yang dilakukan oleh BPK berkurang maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat. Ini berarti kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta kelemahan stuktur pengendalian intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk pengambilan opini oleh BPK. Sedangkan koefisien regresi untuk KSPAB sebesar 0,061. Ini berarti disaat kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan pendapatan anggaran dan belanja yang ditemukan oleh BPK bertambah maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan mengalami peningkatan kualitas laporan keuangan.

4.4. Uji Secara Simultan

Tabel 6
Data Analisis Regresi Logistik Pengujian Secara Simultan

Keterangan	Chi-Square	Df	Sig.
Step	34,146	3	0,000
Block	34,146	3	0,000
Model	34,146	3	0,000

Sumber: data diolah 2016

Pada tabel 6 hasil pengujian secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terkait. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Sig. Model sebesar 0,000 lebih kecil dari 5% (0,05) sehingga disimpulkan bahwa variabel bebas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern) yang digunakan secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5. Pembahasan Hipotesis

Hipotesis pertama mengenai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis hipotesis ini menyatakan bahwa kemungkinan besar kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan berpengaruh negative (-0,211) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, ini berarti semakin berkurangnya temuan pada laporan keuangan terkait masalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik, laporan keuangan akan tersampaikan dengan tepat waktu, serta akuntabilitas terpercaya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putu Upabayu Rama Mahaputra dan Wayan Putra, 2014 tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil analisis yang menguji kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya pengaruh positif sebesar 0,061, yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mempunyai pengaruh yang tinggi juga terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Alasan mengapa terjadi demikian adalah peneliti berasumsi bahwa pemerintah daerah yang memiliki kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya manusia yang baik dalam hal akuntansi dan pelaporan serta dalam hal struktur pengendalian intern tetapi kondisi infrastruktur yang mengakibatkan adanya pendapatan anggaran dan belanja meningkat dan hal ini akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, Nelly Sari dan Rasuli, (2014) mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara positif antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga mendukung penelitian Beni Pekei, Djumilah Hadiwidjojo, Djumahir, Sumiati (2014) tentang pelaksanaan manajemen aset yang berpengaruh signifikan terhadap keefektifan manajemen aset lokal. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi nilai kelemahan dari sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja searah dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian mengenai pengaruh struktur pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan angka negatif, yaitu sebesar -0,165. Ini berarti semakin rendah tingkat temuan yang dilakukan oleh BPK terkait kelemahan struktur pengendalian intern maka semakin tinggi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mendukung Tuti Herawati, 2014 yang menyatakan bahwa adanya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, juga penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana (2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil analisis yang menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa bagian yang ada pada kelemahan sistem pengendalian intern seperti: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya pengaruh secara simultan ini ditunjukkan pada hasil analisis yang diolah secara statistik yaitu menunjukkan nilai yang signifikan sebesar 0,000. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu seperti: Tuti Herawati, 2014 yang menyatakan adanya pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, Susilawati, Dwi Seftihani Riana, 2014 menyatakan adanya pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, Putu Upabayu Rama Mahaputra dan Wayan Putra, 2014 juga menyatakan adanya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan serta penelitian yang dilakukan oleh Dewi Indriasih (2014) yang menyatakan juga adanya pengaruh sistem kontrol pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah lokal.

5. SIMPULAN

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta kelemahan struktur pengendalian intern pada temuan kasus yang dilakukan oleh BPK mengalami penurunan atau temuan kelemahan berkurang maka akan mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Berbeda dengan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan pendapatan anggaran dan belanja yang ditemukan oleh BPK bertambah maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan mengalami peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini diasumsikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang baik dan mengalami keadaan infrastruktur tertentu yang mengharuskan adanya pelaksanaan pendapatan anggaran dan belanja yang cukup tinggi yang akan berpengaruh meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan setelah dilakukan perhitungan mengenai opini BPK menggunakan pengkategorian WTP dan NON WTP, bahwa tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di pulau Jawa lebih baik kualitasnya dibandingkan laporan keuangan yang berada di luar pulau Jawa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada subjektivitas responden yang diambil dari populasi, keterbatasan ini membuat penelitian rentan terhadap biasnya jawaban responden, untuk itu temuan dalam penelitian ini harus dimaknai hati-hati; berdasarkan pengamatan peneliti, masih banyak informasi yang enggan diungkapkan oleh beberapa narasumber. Hal ini mungkin karena rasa takut untuk membuka informasi yang bersifat rahasia kepada publik, disini peneliti menekankan bahwa penelitian ini bersifat akademis dan bukan untuk dipublikasikan; metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, sehingga penelitian ini memiliki tingkat validitas eksternal yang rendah, dengan demikian penelitian ini memiliki tingkat kemampuan generalisasi yang rendah.

Penelitian selanjutnya diharapkan bukan hanya menggunakan sampel tetapi lebih baiknya semua data atau populasinya; untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan metode survei ketempat penelitian agar lebih mengetahui lebih spesifik mengenai data yang akan diteliti; penelitian selanjutnya diharapkan, penelitian ini bisa menjadi referensi yang baik dalam hal informasi.

6. REFERENSI

- [1] *Accounting Media*, 2013. *Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Sebagai Upaya Terselenggaranya Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah*.
- [2] Agoes Sukrisno. 2008. *Auditing Pemeriksaan Oleh Kantor Akuntan Publik. Jilid satu. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*
- [3] Ahid Wahyu Kurniawan. Agustus 2014. *Otonomi Daerah*. Ahid-wahyu-fisip 12.web.unair.ac.id. 18 November 2015
- [4] Amiruddin Zul Hilmi, Dwi Martani. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Indonesia, Jakarta*
- [5] Arief, Anggyansyah. Januari 2013. *Teori Keagenan (Agency Theory)*. Anggyansyah.blogspot.co.id. 18 November 2015
- [6] Arfan Ikhsan. (2009). *Pengantar Praktis Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [7] Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- [8] Beni Pekei, dkk. 2014. The Effectiveness Of Local Asset Management (A Study On The Government Of Jayapura). *International Journal of Business and Management Invention ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X www.ijbmi.org Volume 3 Issue 3 March. 2014 PP.1626*
- [9] Cris Defera. 2013. *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan Pada Ketentuan Perundang-undangan Terhadap Penentuan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2008-2011*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- [10] Desi Fatimah, Ria Nelly Sari & M. Rasuli. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1, Oktober 2014 : 1 – 15*
- [11] Dewi Indriasih, 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.5, No.20, 2014*
- [12] Gozali, Iman. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- [13] Imraah Maulidia, Rizal Effendi, dan Cherrya Dhia. 2014. Pengaruh Penerapan Drandar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. *Jurnal Jurusan Akuntansi, Palembang*
- [14] Jama'an. 2008. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Universitas Diponegoro*. Semarang.
- [15] Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- [16] Junaedi Yusuf. 2014. Determinan Faktor yang Mempengaruhi Luas Cakupan Pengungkapan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 1, No. 1, September 2014, Halaman 56-69*
- [17] Madiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Riduwan. 2005. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Cetakan Ketiga*. Bandung: Alfabeta
- [18] Mahmudi. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- [19] Mahsun, M., Sulistiyowati, F., dan Purwanugraha, H.A., (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE
- [20] Maria Immaculatta. teori-sinyal. 2006. <http://ekonomi.kabo.biz/2011/07/teori-sinyal.html>. 21 Februari 2016
- [21] Munawir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty
- [22] Putu Upabayu Rama Mahaputra, Wayan Putra. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2 (2014) : 230-244*
- [23] Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis No 1 Vol. 13, April 2008*
- [24] Scott Besley dan Eugene F. Brigham. 2008. *Essential of Managerial Finance. Fourteen Edition*. New jersey: prentices Hall.
- [25] Scott, William R. 1997. *Financial Accounting Theory, 2nd Edition*, Canada Inc: Prentices Hall. Available from: <http://gdeeka01.blogspot.co.id/2012/06/agency-theory.html>
- [26] Stastikceria. Januari 2013. [Tutorial] Contoh Analisis Regresi Logistik biner/dikotomi dengan SPSS.
- [27] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*.
- [28] Sukrisno Agoes, 2012, *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Pubik*, Edisi 4 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta
- [29] Susilowati, Dwi Seftihani Riana. 2014. Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Study & Accounting Research, Volume XI, No.1 – 2014*
- [30] Tuti Herawati. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Study & Accounting Research, Volume XI, No.1 – 2014*
- [31] Undang-Undang No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- [32] Undang-Undang No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- [33] Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan
- [34] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- [35] Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- [36] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- [37] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- [38] Wahyu Setiawan. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang
- [39] www.bpk.go.id